

## Urbanisasi dan Perkembangan Pariwisata di Kota Bogor

Agustina Multi Purnomo 

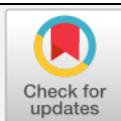
Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda,  
16720, Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Korespondensi: [agustina.m@unida.ac.id](mailto:agustina.m@unida.ac.id)

### INFO ARTIKEL

#### Info Publikasi:

Artikel Hasil Penelitian



#### Sitasi Cantuman:

Purnomo, A. M. (2021).

Urbanization and Tourism

Development in Bogor City.

Society, 9(1), 393-409.

DOI: [10.33019/society.v9i1.338](https://doi.org/10.33019/society.v9i1.338)

Hak Cipta © 2021. Dimiliki oleh  
Penulis, dipublikasi oleh Society

OPEN  ACCESS



Artikel dengan akses terbuka.

Lisensi: Atribusi-

NonKomersial-BerbagiSerupa

(CC BY-NC-SA)

Dikirim: 3 Mei, 2020;

Diterima: 28 Juni, 2021;

Dipublikasi: 30 Juni, 2021;

### ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak urbanisasi terhadap perkembangan pariwisata di Kota Bogor sebagai bagian dari Jakarta Metropolitan Area (JMA). Studi sebelumnya mengkaji dampak urbanisasi berdasarkan analisis indikator urbanisasi. Hubungan antar kota di JMA menyebabkan arus modal dan penduduk berupa migrasi antar kota, pengembangan kawasan pemukiman dan industri. Penelitian ini mengkaji dampak urbanisasi terhadap perkembangan pariwisata di kota-kota sekitar Jakarta. Argumentasi yang dikemukakan, urbanisasi dapat membangun suatu bentuk pariwisata kota. Penelitian dilakukan di Kota Bogor yang merupakan bagian dari JMA yang telah mengalami urbanisasi sejak zaman kerajaan dan memiliki beragam layanan pariwisata. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkaji data indikator urbanisasi dan hubungan antara historis urbanisasi dan data indikator urbanisasi dengan perkembangan fasilitas pariwisata. Kajian menemukan bahwa urbanisasi mendorong berkembangnya fasilitas pariwisata hotel dan restoran di Kota Bogor. Hal ini tidak terkait dengan historis urbanisasi kota, perkembangan pariwisata lainnya, dan posisi relatif Kota Bogor di antara kota-kota JMA. Urbanisasi mendorong berkembangnya fasilitas pariwisata melalui kegiatan wisata antar kota. Penelitian ini mengusulkan untuk mengkaji pengembangan fasilitas pariwisata sebagai perspektif baru dalam studi urbanisasi di JMA.

**Kata Kunci:** Jakarta Metropolitan Area; Kota Bogor; MICE; Pariwisata; Urbanisasi

## 1. Pendahuluan

Sebagian besar studi urbanisasi berfokus pada *Jakarta Metropolitan Area* (JMA) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian sebelumnya mengkaji urbanisasi JMA dari peningkatan penduduk perkotaan (Firman, 2016; Firman *et al.*, 2007); konsentrasi kegiatan dan fasilitas ekonomi (Hudalah & Firman, 2012; Firman & Fahmi, 2017); peningkatan perumahan dan *real estate* (Winarso & Firman, 2002); perubahan penggunaan lahan (Cahya *et al.*, 2018; Nurwanda & Honjo, 2018a; Robbany *et al.*, 2019; Arifien & Rustandi, 2019); perubahan lingkungan dan peningkatan suhu (Nurwanda & Honjo, 2020; Nurwanda & Honjo, 2018b; Widyasamratri *et al.*, 2019); mengurangi area pertanian dan meningkatkan area urbanisasi (Priyadi & Pauleit, 2015; Abdunnur, 2020). Urbanisasi JMA dilihat sebagai aliran modal dari pusat (Jakarta) dan menyebar ke Kota Bodetabek (Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Penelitian sebelumnya mengkaji dampak urbanisasi terhadap peningkatan indikator urbanisasi seperti pertumbuhan penduduk, pembentukan kota mandiri, kota komuter, dan kota industri di JMA.

Masih sedikit penelitian yang meneliti hubungan antara urbanisasi dan pengembangan pariwisata di JMA. Urbanisasi terkait dengan industrialisasi dan pengembangan sektor pariwisata hotel dan restoran (Patty & Kuncoro, 2016). Mereka menggunakan uji korelasi kuantitatif pertumbuhan sektor industri dengan data kontribusi pendapatan daerah sektoral. Penelitian kualitatif yang mengkaji hubungan antara proses historis urbanisasi dan perkembangan pariwisata masih jarang dilakukan di JMA.

Kota Bogor merupakan kota yang telah mengalami urbanisasi sejak awal kemunculannya. Kota Bogor telah menjadi pusat perekonomian dan pemerintahan sejak Kerajaan Sunda (670 M), kota terbesar kedua di Nusantara, dan pusat pemerintahan dan militer pada masa penjajahan Belanda dan Jepang (Danasasmita, 2012). Kota Bogor menjadi bagian dari program JMA di bawah Presiden Sukarno dan Suharto (Tohjiwa *et al.*, 2010). Kota Bogor dan Detabek (Depok, Tangerang, dan Bekasi) telah mengalami semua fase urbanisasi (Winarso *et al.*, 2015). Urbanisasi di Kota Bogor mendorong pengembangan fasilitas hotel dan restoran daripada sektor industri. Kontribusi PDRB dari sektor akomodasi, makanan dan minuman di Kota Bogor merupakan yang terbesar. Sebaliknya, kontribusi PDRB dari sektor industri paling kecil di antara kota-kota Detabek (BPS Kota Bogor, 2020; BPS Kota Tangerang, 2020; BPS Kota Depok, 2020; BPS Kota Bekasi, 2020). Berbeda dengan Patty & Kuncoro (2016), perkembangan sektor hotel dan restoran di Kota Bogor belum melalui perkembangan sektor industri.

Proses di Kota Bogor berbeda dengan pendekatan urbanisasi pariwisata, dan pariwisata mendorong urbanisasi (Mullins, 1991; Hannigan, 1995). Kota Bogor tidak memiliki satu tujuan wisata unggulan yang mendorong urbanisasi. Jumlah kunjungan wisatawan tertinggi terdapat pada objek wisata lainnya (BPS Kota Bogor, 2020). Objek wisata lainnya tidak mengacu pada satu destinasi wisata sebagai ciri wisata kota, seperti kajian Mullins & Hannigan. Ini menunjukkan proses sebaliknya, dan urbanisasi adalah penyebab perkembangan pariwisata. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan, bagaimana urbanisasi membangun pariwisata Kota Bogor?

Studi ini mengusulkan perspektif baru pada studi urbanisasi JMA. Sebelumnya, hubungan antar kota di JMA mempelajari aliran modal dan penduduk berupa migrasi antar kota, perkembangan kawasan pemukiman dan industri. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji arus modal antar kota berupa arus pengunjung untuk tujuan wisata dan mengembangkan bentuk wisata perkotaan. Peneliti menggunakan analisis historis urbanisasi di Kota Bogor berdasarkan indikator urbanisasi dari penelitian sebelumnya, membandingkan urbanisasi di Kota Bogor

dengan Kota Detabek untuk merumuskan kekhasan urbanisasi di Kota Bogor dan perkembangan fasilitas pariwisata di Kota Bogor untuk menjawab penelitian pertanyaan.

## 2. Kajian Pustaka

Urbanisasi mengubah masyarakat pedesaan menjadi perkotaan (Firman, 2016). Urbanisasi mengakibatkan bertambahnya jumlah penduduk, kawasan pemukiman, berkurangnya luas areal pertanian, dan bertambahnya fasilitas perkotaan. Fasilitas pariwisata termasuk fasilitas perkotaan (lihat definisi dan karakteristik kawasan perkotaan, Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 37 Tahun 2010).

Kota Bogor merupakan bagian dari JMA, dan memahami urbanisasi di Kota Bogor berada dalam kerangka Kota Bogor sebagai bagian dari JMA. Program JMA menandai perubahan signifikan di JMA. Program JMA diawali dengan semangat membangun Jakarta sebagai ibu kota yang indah dengan menjadikan Kebayoran Baru sebagai Kota Komuter pada tahun 1950 (Firman & Fahmi, 2017). Program JMA belum berdampak signifikan terhadap Detabek. Jakarta masih menjadi pusat perekonomian, sedangkan pusat pemerintahan direncanakan akan dipindahkan ke Palangka Raya pada tahun 1957-1958 (Wijarnaka, 2006). Sukarno merencanakan Palangka Raya sebagai pusat pemerintahan, Jakarta sebagai pusat ekonomi dan hubungan internasional, dan Jawa sebagai pusat penghasil pangan dan pariwisata sehingga pusat-pusat pembangunan Indonesia tidak terkonsentrasi di Jakarta dan Jawa (Tinker & Walker, 1973, p. 1105; Wijarnaka, 2006; Pauker, 1961).

Perubahan arah program JMA terjadi pada masa Suharto. Suharto merancang implementasi program Ja-Bo-Ta-Bek melalui Inpres No. 13 Tahun 1976 tentang Ja-Bo-Ta-Bek dan menetapkan kawasan Bodetabek sebagai kota penyangga ibu kota dan kota pemukiman (Tohjiwa *et al.*, 2010). Era Suharto adalah masa pembangunan besar-besaran yang didukung oleh politik liberal dan konglomerat di JMA (Vickers, 2005, p. 189). Proses di bawah Suharto menghasilkan pembangunan regional dan berpusat pada aktor. Kekuatan global melalui investasi asing masuk ke Indonesia, khususnya di Jakarta. Pembangunan terpusat di Jakarta dan menjadikan daerah sebagai perpanjangan dari pusat (Vickers, 2005, pp. 189-190; Hudalah & Firman, 2012). Pembangunan pabrik, pertumbuhan sektor keuangan, dan sarana lain untuk memenuhi kebutuhan bisnis seperti hotel dipusatkan di JMA (Vickers, 2005, p. 190; Hudalah & Firman, 2012). JMA merupakan kawasan yang paling berkembang di Indonesia, termasuk pertumbuhan penduduk dan sarana pemenuhan kebutuhan penduduk, seperti perumahan. JMA mengalami perkembangan *real estate* pada tahun 1987-1989, dan kawasan residensial meningkat tajam pada tahun 1990-1994. Pelaku usaha dan penyedia fasilitas perkotaan, termasuk perumahan, terpusat pada kelompok pengusaha (Hudalah & Firman, 2012).

Jakarta adalah pusat pertumbuhan di JMA. Perkembangan kota-kota di sekitar Jakarta, termasuk Kota Bogor, memperluas pembangunan dari Jakarta (Firman *et al.*, 2007). Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah penduduk di Detabek dibandingkan di Jakarta (Firman, 2004; Firman *et al.*, 2007). Peningkatan jumlah penduduk menandai transformasi kota-kota pinggiran Jakarta pada tahun 1970-1990, dan pada tahun 1990-an ditandai dengan pembangunan lahan yang masif (Winarso & Firman, 2002).

Urbanisasi di Bodetabek sebagai bagian dari program JMA terjadi dalam tiga fase. Pertama, Kota Bogor, Kota Bogor, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi berkembang sebagai kawasan peri-urban Jakarta. Bodetabek berperan dalam mengakomodir pertumbuhan penduduk Jakarta yang semakin meningkat, mendukung kegiatan industri, perdagangan, dan jasa di Jakarta. Pembangunan jalan tol Jagorawi pada tahun 1980 merupakan penanda posisi Bodetabek sebagai wilayah peri-peri Jakarta (Winarso *et al.*, 2015).

Fase pertama mendorong fase kedua. Bodetabek telah berkembang menjadi kota pinggir. Bodetabek menjadi kota sub urban dan mengalami peningkatan jumlah penduduk, campuran perkotaan dan agraris, peningkatan fungsi kota sebagai pemukiman, dan pola komuter penduduk pada tahun 1990-2010 (Firman, 2016). Kelompok kelas menengah menempati kawasan pemukiman di Bodetabek dan bekerja di Jakarta (Winarso *et al.*, 2015). Fase ini juga ditandai dengan peningkatan kehidupan masyarakat sub urban seperti pusat perbelanjaan, pendidikan, dan bisnis lainnya (Firman & Fahmi, 2017). Sentra industri berpindah dari Jakarta ke kota peri (Firman & Fahmi, 2017). Perkembangan Bodetabek sebagai daerah peri-urban telah mendorong berkembangnya industri dan manufaktur khususnya di wilayah Jababeka (Hudalah & Firman, 2012). Kelompok bawah menempati kawasan kumuh di Jakarta atau pemukiman padat di pinggir kota Jakarta, bekerja di sektor informal atau buruh pabrik dan menjadi pengangguran (Vickers, 2005, p. 117).

Fase kedua mendorong fase ketiga. Bodetabek telah berkembang menjadi kota post-sub-urban. Bodetabek telah meningkatkan kemandirian dari Jakarta, kota yang awalnya berperan dalam mendukung Jakarta untuk tumbuh menjadi pusat-pusat baru, pertumbuhan penduduk, peran sentral sektor swasta, kebijakan pemerintah yang pro pertumbuhan, dan privatisasi penggunaan lahan (Firman, 2016; Firman & Fahmi, 2017). Bodetabek telah menjadi pusat kota industri, permukiman, jasa dengan lembaga keuangan domestik dan internasionalnya sendiri (Firman & Fahmi, 2017). Otonomi daerah memperkuat proses pembentukan kota post-sub-urban. UU Otonomi Daerah menyebabkan pemerintah daerah menentukan arah pembangunan, pola kerjasama antara pemerintah dengan swasta, dan masyarakat kota (Firman, 2014).

Analisis pengembangan fasilitas pariwisata di urbanisasi masih jarang dilakukan. Pariwisata merupakan penggerak urbanisasi melalui pembangunan perkotaan untuk memenuhi kepentingan konsumsi pengunjung (Mullins, 1991). Kota-kota *postmodern* mengalami pergeseran dari pengembangan manufaktur ke pengembangan pariwisata, taman hiburan, gentrifikasi, dan pusat hiburan perkotaan (Hannigan, 1995). Keberadaan atraksi wisata di suatu kota akan membangun tempat-tempat khusus untuk memfasilitasi kebutuhan pengunjung. Studi mereka menekankan pariwisata sebagai pendorong urbanisasi. Lalu, bagaimana urbanisasi mempengaruhi perkembangan pariwisata kota?

Perkembangan suatu kota mendorong pariwisata kota dengan menyediakan fasilitas wisata. Kota-kota besar selalu signifikan sebagai pusat wisata karena perjalanan bisnis, teman, kerabat, dan pengunjung harian untuk kegiatan budaya, olahraga, atau belanja (Law, 1991). Kegiatan produktif penduduk kota membutuhkan ruang konsumsi dalam ruang pariwisata dan rekreasi (Lefebvre, 1991, p. 58). Kota-kota besar yang belum memiliki daya tarik wisata utama membangun objek wisata buatan, pusat perbelanjaan, hiburan malam, teater seni dan budaya, festival, pusat penyelenggaraan kompetisi olahraga, fasilitas kesehatan, operasi plastik, dan MICE (*Meetings, Incentives, Conference, and Exhibition*) untuk mendorong kedatangan pengunjung dan memfasilitasi kegiatan rekreasi penduduk kota (Budiman *et al.*, 2019; Kusuma, 2019; Rani *et al.*, 2016; Ormond *et al.*, 2014; Singh, 2014; Simanjuntak, 2013; Rosyidie *et al.*, 2012). Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan fasilitas pariwisata menjadi dasar untuk menilai dampak urbanisasi terhadap perkembangan pariwisata kota. Kajian ini mengkaji dampak urbanisasi terhadap pengembangan pariwisata perkotaan dengan mengkaji fase-fase urbanisasi dan keterkaitan setiap fase dengan perkembangan fasilitas pariwisata di Kota Bogor.

### 3. Metodologi Penelitian

Kota Bogor dipilih sebagai lokasi penelitian karena Kota Bogor merupakan bagian dari JMA dengan sejarah kota terpanjang. Kota Bogor memiliki sejarah sebagai kota besar sejak

zaman kerajaan dan telah mengalami fase-fase urbanisasi seperti kota-kota JMA lainnya. Kota Bogor memiliki obyek wisata yang beragam mulai dari wisata alam, wisata buatan, MICE, dan kuliner.

Penelitian ini memandang urbanisasi sebagai hasil dan proses. Proses urbanisasi terjadi karena Kota Bogor memenuhi semua indikator kawasan perkotaan (BPS Kota Bogor, 2020). Urbanisasi masih berlangsung karena Kota Bogor masih mengalami peningkatan di semua indikator kawasan perkotaan. Mempertimbangkan urbanisasi sebagai sebuah proses, penelitian ini dilakukan mengikuti arus sejarah urbanisasi di Kota Bogor. Penelitian tentang hubungan antara urbanisasi dan pengembangan pariwisata didasarkan pada fase historis urbanisasi dan indikator urbanisasi di setiap fase. Peneliti melakukan kajian sejarah dengan mempelajari dokumen-dokumen sejarah kota, wawancara dengan tiga pakar budaya, dan sekelompok pegiat budaya di Kota Bogor. Kajian fase urbanisasi menggunakan data sekunder dari Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Bekasi, Kota Depok, dan Jawa Barat untuk mengetahui kekhasan urbanisasi di Kota Bogor. Posisi teoritis penelitian memandang Jakarta sebagai wilayah sentral sehingga peneliti fokus pada wilayah Detabek sebagai wilayah pembanding. Program JMA adalah penanda urbanisasi. Oleh karena itu peneliti membagi pembahasan tentang urbanisasi di Kota Bogor menjadi dua bagian, sebelum program JMA, dan setelah program JMA. Kedua bagian ini mendefinisikan hubungan antara urbanisasi dan pengembangan fasilitas pariwisata perkotaan.

Hubungan antara urbanisasi dengan perkembangan fasilitas pariwisata menggunakan data lokasi untuk fasilitas wisata yang paling berkembang dan menganalisis data lokasi menurut penanda urbanisasi di Kota Bogor. Peneliti membenarkan hubungan antara dampak urbanisasi dan pengembangan pariwisata berdasarkan keterkaitan antara proses urbanisasi dan pengembangan fasilitas pariwisata yang paling berkembang di Kota Bogor. Peneliti mengkonfirmasi data perkembangan fasilitas pariwisata dengan data kecenderungan pengunjung dan asal pengunjung untuk menemukan keterkaitan antara perkembangan pariwisata di Kota Bogor dengan kota Jabodetabek.

Tren pengunjung dinilai melalui survei digital. Penyebaran kuesioner menggunakan e-mail, Whatsapp, Twitter, dan Facebook. Pengisian kuesioner oleh 1.414 responden dan hanya 747 kuesioner yang memenuhi syarat pengolahan data. Kuesioner yang diisi oleh responden dari Kota Bogor dikeluarkan dari pengolahan data. Wisatawan adalah orang yang datang dari luar lingkungannya atau dalam penelitian ini diartikan sebagai orang yang datang dari luar Kota Bogor. Sebanyak 747 kuesioner memenuhi persyaratan untuk estimasi populasi pengunjung. Menurut data pengunjung tahun 2019, jumlah pengunjung Kota Bogor adalah 7.965.987 (BPS Kota Bogor, 2020). Jumlah sampel melebihi 385 orang dalam memenuhi tingkat kepercayaan ( $\alpha$ ) 95% (Adam, 2020). Pengolahan data survei menggunakan *software* SPSS versi 24 dan penyajian data dalam bentuk persentase.

## 4. Hasil Penelitian

### 4.1. Pariwisata di Kota Bogor Sebelum Program JMA

Kota Bogor telah mengalami urbanisasi sejak zaman kerajaan. Kota Bogor merupakan bagian dari wilayah Pakuan atau ibu kota Pajajaran (Danasmita, 2003, pp. 7-56). Pakuan merupakan kota terbesar kedua di Nusantara setelah Demak, dengan jumlah penduduk 48.271 jiwa. Pembangunan kota, perkebunan, perdagangan, dan pembangunan pertahanan kerajaan telah terjadi sejak masa kerajaan (Danasmita, 2012). Sebagai pusat kerajaan, Kota Bogor mengalami pergeseran sejak masa kolonial pada abad ke-17. Masa transisi dari kota tradisional

ke kota kolonial terjadi pada paruh kedua abad ke-18 dan sepenuhnya menjadi kota kolonial pada abad ke-19 (Zakaria, 2010, p. 4).

Pergeseran ini menentukan urbanisasi di Kota Bogor. Pemerintah kolonial Belanda menetapkan empat fungsi Kota Bogor sebagai penanda penting urbanisasi dan perkembangan pariwisata di Kota Bogor (Zakaria, 2010). Pemerintah Belanda menetapkan Kota Bogor sebagai kota peristirahatan, pusat pengembangan ilmu pengetahuan, pemerintahan, dan pusat perekonomian daerah. Pembangunan Istana Bogor dan Kebun Raya Bogor (KRB) pada tahun 1817 menandai fungsi kota sebagai tempat peristirahatan (Danasasmita, 2012, p. 91). KRB menjadikan Kota Bogor sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan (Goss, 2011, p. 29). Pembentukan *Algemene Secretarie* (Sekretariat Negara) pada tahun 1828 merupakan tanda fungsi Kota Bogor sebagai pusat pemerintahan (Zakaria, 2010, p. 6). Perkembangan Bogor (*Buitenzorg* atau Kota Tanpa Rasa Risau) sebagai pusat perkebunan pada masa Gubernur Jenderal Henricus Zwardcroon (1718-1725) dan adanya pedagang Tionghoa di sekitar jalan Suryakencana tahun 1777 (Danasasmita, 2012, p. 94) atau tahun 1672 (Tjiok, 2007) merupakan tanda fungsi Kota Bogor sebagai pusat perekonomian daerah.

Keempat fungsi tersebut berjalan seiring dengan perkembangan pariwisata di Kota Bogor. Keempat fungsi kota tersebut menyebabkan banyak pendatang, seperti pejabat Belanda dari Batavia, ilmuwan, pekerja, dan pedagang (Zakaria, 2010, p. 18; Danasasmita, 2012, pp. 90-91). Pemerintah Belanda menawarkan paket wisata Kota Bogor sebagai bagian dari wisata Jawa dengan daya tarik utama KRB dan kesejukan areal perkebunan (Iskandar, 2018).

Masa penjajahan Jepang merupakan masa penurunan pariwisata di Kota Bogor (Iskandar, 2018). Karakteristik Kota Bogor sebagai tempat peristirahatan berkurang akibat beralihnya lahan perkebunan menjadi persawahan, sehingga mengurangi lanskap hijau di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor. Perkebunan teh dan karet merupakan perkebunan yang terpelihara, sehingga masih banyak kebun teh di Bogor saat ini (Zuhdi, 2017, pp. 57-59). Objek wisata peninggalan zaman penjajahan Jepang adalah Museum PETA, sebuah bangunan peninggalan Belanda yang difungsikan sebagai museum PETA pada tahun 1995.

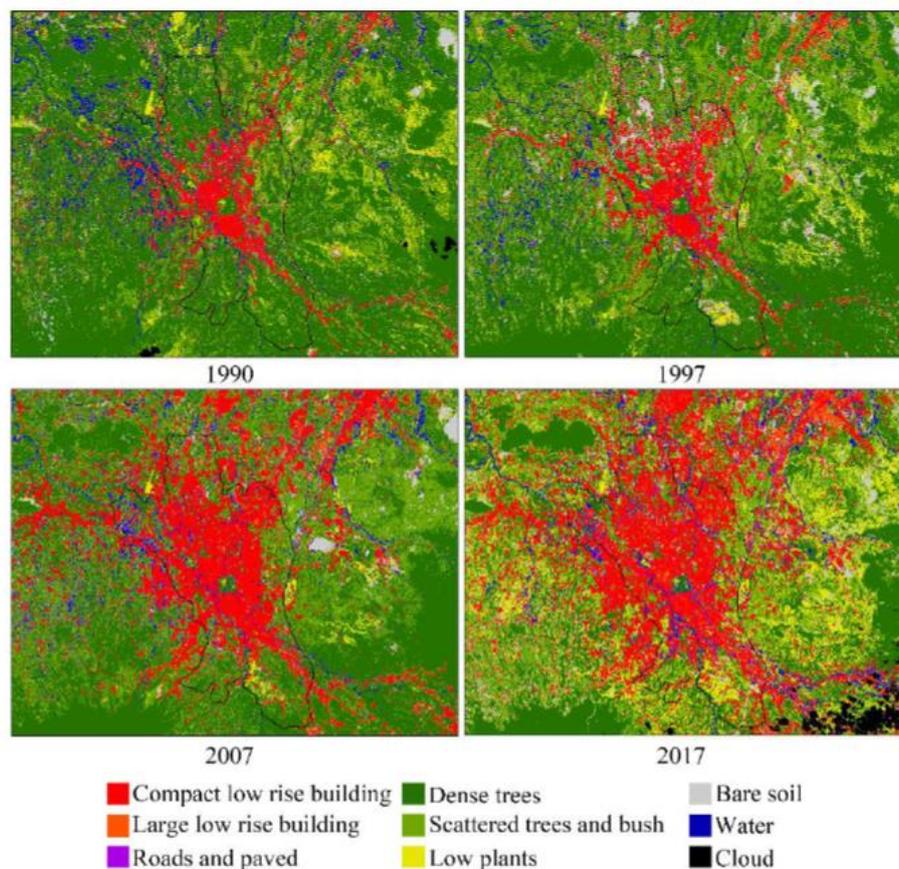
Program JMA didirikan pada masa kepresidenan Sukarno. Penelitian ini mencakup masa Presiden Soekarno pada masa sebelum JMA akibat perubahan Kota Bogor karena program JMA terjadi pada masa Presiden Suharto. Hingga Sukarno, pemerintah Belanda membangun fasilitas perkotaan dan kawasan pemukiman sebagai bagian dari rencana Kota Bogor sebagai kota peristirahatan bagi kaum elite (Winarno, 1990, p. 12). Presiden Sukarno menetapkan Istana Bogor sebagai tempat peristirahatan di Indonesia untuk mengembangkan pariwisata di sekitar Istana Bogor pada tahun 1957. Presiden Sukarno menetapkan kompleks perumahan Villa Duta untuk menampung para duta besar yang bertugas di Indonesia. Pengembangan pariwisata massal diarahkan ke kawasan Puncak, di Kabupaten Bogor melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1963. Program Jabodetabek di bawah Presiden Sukarno tidak banyak berdampak pada pariwisata di Kota Bogor.

Kesimpulannya, urbanisasi berjalan seiring dengan penetapan fungsi Kota Bogor dan pengembangan pariwisata hingga masa Presiden Sukarno. Sejarah urbanisasi menjadikan dasar Kota Bogor sebagai tujuan wisata, kota sejarah, kota resor, kota pengembangan ilmu pengetahuan, dan kota bisnis perkebunan. Penyediaan fasilitas kota sejalan dengan fungsi kota dan mendukung pengembangan pariwisata kota. Hal ini membangun karakter *Buitenzorg* lama dan memperkuat citra Kota Bogor sebagai kota bersejarah dan kota peristirahatan (Hartanti, 2014).

#### 4.2. Urbanisasi dan Evaluasi Pariwisata di Kota Bogor Pasca JMA

Program Jabodetabek di bawah Presiden Suharto membawa posisi kota-kota di sekitar Jakarta sebagai kota penyangga Jakarta. Fase peri-urbanisasi dan sub-urbanisasi di Kota Bogor sama seperti di Detabek. Kota Bogor mengalami perubahan karakteristik desa menjadi kota melalui peningkatan jumlah penduduk, pengurangan lahan pertanian, penambahan kawasan pemukiman, industri, jasa, dan pola penduduk komuter (Firman & Fahmi, 2017; Firman, 2011; Hudalah & Firman, 2012). Kota Bogor mengalami peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan perubahan status Kota Bogor dari kota kecil menjadi kota sedang dalam kurun waktu 29 tahun (lihat klasifikasi kota menurut PBB, 2014). Hanya 0,72% penduduk bekerja di sektor pertanian, dan sebagian besar penduduk bekerja di perdagangan besar, eceran, restoran, dan hotel (34,50%), disusul bekerja di bidang lain (25,26%). Luas areal persawahan berkurang 57,24% dalam kurun waktu lima tahun, dan hanya tersisa 2,71% dari luas Kota Bogor (BPS Kota Bogor, 2020). Kota Bogor mengalami pemekaran kawasan pemukiman yang luas dari tahun 1090 (Gambar 1). Proses ini terjadi di seluruh kota Detabek (BPS Kota Bogor, Kota Tangerang, Kota Depok, dan Kota Bekasi, 2020).

Kota Bogor telah memasuki fase awal post-suburban dalam fase urbanisasi Jabodetabek. Kota Bogor mengalami perpaduan pusat pertumbuhan ekonomi dengan kawasan pinggiran kota, peningkatan kemandirian kota dengan berbagai basis ekonomi, pergeseran kegiatan ekonomi dari Jakarta, pergeseran penggunaan lahan, arus orang dari Bogor ke Jakarta, dan sebaliknya (Firman, 2011; Firman & Fahmi, 2017). Kebijakan otonomi daerah memperkuat fase pasca-suburbanisasi (Firman, 2008; Firman & Fahmi, 2017).



Gambar 1. Perubahan Kawasan Perkotaan di Kota Bogor 1990-2017

Sumber: Nurwanda & Honjo (2018a)

Fase post-sub-urban di Kota Bogor berbeda dengan Detabek. Kota Bogor tidak tumbuh sebagai kota industri seperti Tangerang, Depok, atau Bekasi. Kontribusi sektor industri dan pengolahan terhadap total PDRB di Kota Bogor paling kecil dibandingkan Detabek. Kota Bogor hanya memiliki tiga pabrik besar (Boehringer Ingelheim, Unitex, dan Good Year). Kota Bogor tidak memiliki kota mandiri seperti Alam Sutra dan Bumi Serpong Damai di Tangerang atau kota industri Cikarang di Bekasi (Hudalah & Firman, 2012; Winarso *et al.*, 2015). Kota Bogor tidak termasuk dalam kawasan JMA dengan nilai jual perumahan tertinggi. Nilai penjualan rumah bulanan tertinggi terjadi di Tangerang, dan peningkatan nilai penjualan terbesar terjadi di Bekasi (www.rumah.com, diakses 23 September 2018).

Sektor pertanian di Kota Bogor paling rendah dibandingkan Detabek. Kota Bogor mengalami penurunan terbesar pada sektor pertanian, dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB paling kecil dibandingkan Detabek. Kota Bogor berkembang sebagai kota perdagangan. Bodetabek telah mengalami perkembangan di sektor perdagangan, namun hanya di Kota Bogor sektor ini memberikan kontribusi PDRB tertinggi (BPS Kota Bogor, 2020; BPS Kota Tangerang, 2020; BPS Kota Depok, 2020; BPS Kota Bekasi, 2020).

Dampak yang membedakan urbanisasi di Bogor dan Detabek adalah berkembangnya sektor hotel dan restoran. Persentase kontribusi PDRB dari penyediaan akomodasi, makanan, dan minuman di Kota Bogor merupakan yang terbesar dibandingkan Detabek. Restoran dan hotel merupakan penyumbang pendapatan daerah terbesar di Kota Bogor pada tahun 2015, bersama dengan sektor perdagangan (22,25%) dan sektor dengan pertumbuhan total pinjaman perbankan terbesar pada tahun 2016 atau 19,44% dari total pinjaman sektor ekonomi. Sektor ini menyerap tenaga kerja terbesar (120.802 orang) (BPS Kota Bogor, 2020; Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2017). Kondisi ini sudah terjadi sejak tahun 2010 (BPS Kota Bogor, 2010). Pada tahun 2010, jumlah hotel sebanyak 44 unit, jauh di atas Depok (6 unit) dan Bekasi (17 unit) (BPS Provinsi Jawa Barat, 2010). Pada tahun 2018, jumlah hotel di Kota Bogor sebanyak 83 unit, jauh di atas Kota Bekasi (25 unit), Kota Depok (12 unit), dan Kota Tangerang (56 unit) (BPS Kota Bogor, 2020; BPS Kota Tangerang, 2020; BPS Kota Depok, 2020; BPS Kota Bekasi, 2020).

**Tabel 1. Perbandingan Sektor Penyumbang PDRB Berdasarkan Harga Konstan di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi dalam Miliar Rupiah, 2019**

Kota	Jumlah PDRB	PDRB Pertanian	% PDRB	PDRB Real Estate	% PDRB	PDRB Perdagangan	% PDRB	PDRB Sektor Industri Pengolahan	% PDRB	PDRB Sektor Akomodasi dan Makan Minum	% PDRB
Bogor	32.250,50	302,88	0,65	1.010,81	2,18	9.619,47	20,70	8.232,18	17,71	2.204,33	4,74
Depok	49.076,63	543,05	1,34	877,44	1,62	10.684,99	22,15	14.293,45	28,68	1.714,51	4,09
Tangerang	111.890,54	681,75	1,46	7.686,99	5,53	15.297,35	10,67	39.783,75	28,87	1.749,28	1,36
Bekasi	69.404,62	346,09	0,57	1.255,84	1,58	15.905,23	22,55	23.242,49	33,27	2.751,72	4,06

Sumber: BPS Kota Bogor (2020); BPS Kota Tangerang (2020), BPS Kota Depok (2020); BPS Kota Bekasi (2020)

Perkembangan hotel memiliki hubungan dengan sejarah pariwisata di kota Bogor. Pada tahun 1895, empat hotel didirikan di kota Bogor (Winarno, 1990, p. 66). Hotel Passer Baroe, Hotel Bellevue Tibbets, Hotel Chemin de Fer dan Hotel Bellevue. Keberadaan hotel mendukung fungsi kota sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian daerah (Winarno, 1990). Hotel Bellevue Tibbets saat ini adalah Hotel Salak The Heritage.

Wisata MICE menjadi motor penggerak pertumbuhan hotel di Kota Bogor. Bertemu dengan tamu adalah sumber pendapatan utama hotel. Data masa inap tamu hotel menunjukkan bahwa jumlah tamu yang menginap di hotel meningkat dari tahun 2008-2019 dan menurun pada tahun 2015 (BPS Kota Bogor, 2020). Pendapatan hotel di Kota Bogor turun Rp 300 miliar, dan 222 pegawai di-PHK hanya dalam waktu tiga bulan sejak ditetapkannya kebijakan pelarangan pegawai negeri sipil untuk rapat di hotel berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 11 Tahun 2014. Jumlah tamu yang menginap di hotel kembali meningkat pada tahun 2016 setelah kebijakan tersebut dicabut pada tahun 2015.

Hal ini menunjukkan bahwa pendorong peningkatan jumlah hotel berbeda dengan sejarah perkembangan pariwisata di Kota Bogor. Berdirinya hotel di Kota Bogor pada masa Belanda disebabkan karena kedudukan Kota Bogor sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan bisnis. Saat ini, tamu hotel adalah tamu pertemuan yang mengandalkan kebijakan rapat pemerintah.

Usaha jasa kuliner merupakan usaha jasa pariwisata yang paling berkembang di Kota Bogor. Pada tahun 2020 akan ada 1.287 unit di Kota Bogor (Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2020). Pajak restoran merupakan penyumbang terbesar penerimaan pajak sektor pariwisata di Kota Bogor (52,15% dari total pajak restoran, hotel, dan hiburan). Pajak sektor restoran tahun 2007-2016 berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah dibandingkan pajak hotel. Hal ini menunjukkan perkembangan sektor restoran lebih tinggi dibandingkan hotel.

Kota Bogor sebagai kota wisata kuliner memang sangat sedikit dibahas pada waktu-waktu sebelumnya. Keberadaan pemukiman pedagang Tionghoa merupakan awal dari perkembangan kuliner Tionghoa di jalan Suryakencana pada masa pra-Belanda. Sektor kuliner merupakan salah satu sektor pariwisata yang berkembang dan wisata alam dan wisata belanja yang berorientasi KRB (Hartanti & Martokusumo, 2013). Data menunjukkan bahwa sektor kuliner (restoran) merupakan sektor pariwisata yang paling berkembang pada saat penelitian. Kesimpulannya, urbanisasi Kota Bogor setelah JMA telah mengembangkan ciri khas Kota Bogor dibandingkan dengan Detabek. Urbanisasi di Kota Bogor mendorong berkembangnya fasilitas hotel dan restoran.

#### **4.3. Urbanisasi dan Aliran Aktivitas Wisata Antar-Kota**

Peresmian jalan tol Jagorawi pada tahun 1978 merupakan tanda urbanisasi Kota Bogor (Hartanti, 2014). Pembangunan jalan tol Jagorawi menyebabkan perubahan tata ruang dan fungsi kota. Kota Bogor dibangun secara semiliniar pada masa Belanda untuk menghubungkan Kota Bogor dengan Jakarta (melalui jalan Jenderal Sudirman dan jalan Ahmad Yani) dan Cianjur (melalui jalan Tajur). Sebelum tol Jagorawi dibuka, jalan Pajajaran belum ada dan masih berupa semak belukar. Perkembangan kota menyebabkan lokasi pusat kota pada zaman Belanda dan jalan Suryakencana sebagai pusat perdagangan kota. Pembukaan tol Jagorawi menggeser fungsi jalan Jendral Sudirman, jalan Ahmad Yani, jalan Suryakencana, dan jalan Tajur sebagai jalan utama kota. Jalan Pajajaran merupakan pusat kota yang mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) daerah. Jalan Pajajaran merupakan satu-satunya kawasan di Kota Bogor dengan NJOP sebesar Rp13.125.000- jauh di atas kawasan lain dengan NJOP tertinggi sebesar Rp5.625.000 (Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2020).

Perubahan pusat perkembangan kota menyebabkan berkembangnya fasilitas hotel dan restoran. Perkembangan hotel, restoran, dan fasilitas perbelanjaan terjadi di sepanjang jalan Pajajaran setelah dibukanya tol Jagorawi (Hartanti & Martokusumo, 2013; Hartanti, 2014). Jalan Pajajaran merupakan lokasi sebagian besar restoran dan hotel (202 unit dan 16 unit) di Kota Bogor pada tahun 2020. Jumlah ini jauh lebih besar dari jumlah restoran dan hotel di jalan

Djuanda (50 dan 2 unit), jalan Ahmad Yani (35 dan 1 unit), jalan Suryakencana (28 dan 2 unit), dan jalan Tajur (46 dan 3 unit) (data wajib pajak restoran dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor, 2020; [Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2020](#)).

Pengembangan restoran dan hotel di kawasan yang memiliki akses jalan Pajajaran mendukung peran jalan Pajajaran sebagai pusat pengembangan hotel dan restoran terpusat di Kota Bogor. Kawasan dengan akses jalan Pajajaran merupakan ruas jalan yang langsung terhubung dengan jalan Pajajaran. Jalan tersebut adalah jalan Sukasari, jalan Siliwangi, jalan Binamarga, jalan Loader, jalan Kantor Pos, jalan Ciheuleut, jalan Pakuan, jalan Achmad Adnanwijaya, jalan Achmad Sobana, jalan Ahmad Yani, jalan Otto Iskandardinata, jalan Djuanda, jalan Kedung Halang, jalan KS. Tubun dan kawasan Taman Kencana. Kawasan ini merupakan lokasi dari 357 unit restoran dan 32 unit hotel. Jumlah hotel di jalan Pajajaran dan sekitarnya meliputi 57,83 hotel dan 68,25% hotel berbintang dari seluruh hotel yang ada di Kota Bogor.

Pola yang sama dengan jalan Pajajaran terjadi di jalan Soleh Iskandar dan jalan Abdullah Bin Nuh setelah dibangunnya jalan tol BORR pada tahun 2009. Jalan Soleh Iskandar dan jalan Abdullah Bin Nuh terdapat 85 rumah makan, jumlah terbanyak kedua setelah Jalan Pajajaran. Pada tahun 2008, kedua ruas jalan ini menjadi lokasi 20 rumah makan ([Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor, 2009](#)). Jumlah hotel tidak sebanding dengan jumlah restoran. Ada enam hotel di kedua jalan. Tanda penting pembukaan jalan tol BORR adalah dibangunnya dua apartemen yang juga berfungsi sebagai hotel dan satu apartemen dibangun di dua jalan tersebut. Kedua apartemen ini merupakan apartemen pertama di Kota Bogor.

Pembangunan jalan tol bukan satu-satunya pendorong pembangunan hotel dan restoran. Jumlah hotel dan restoran yang berkembang di jalan Tajur tidak sebanyak di jalan Pajajaran. Jalan Tajur memiliki akses langsung ke jalan tol Bogor-Ciawi yang diresmikan pada tahun 1979. Perbedaan dampak pembukaan jalan tol terhadap perkembangan restoran adalah pendirian pusat perbelanjaan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah rumah makan di jalan Tajur setelah dibukanya pusat perbelanjaan BOXES pada tahun 2020. Jumlah rumah makan di Jalan Tajur pada tahun 2019 sebanyak 22 unit. Pembukaan tol BORR ini diikuti dengan pembukaan tiga pusat perbelanjaan di jalan Soleh Iskandar dan jalan Abdullah bin Noah. Peran pembukaan jalan tol dan pendirian pusat perbelanjaan memperkuat penanda dampak urbanisasi terhadap peningkatan fasilitas restoran. Peningkatan fasilitas kehidupan masyarakat seperti pusat perbelanjaan, pendidikan, dan bisnis lainnya merupakan penanda kota pinggir ([Firman & Fahmi, 2017](#)).

Hal ini menunjukkan bahwa urbanisasi mendorong berkembangnya fasilitas hotel dan restoran di Kota Bogor. Data perkembangan fasilitas hotel dan restoran di Kota Bogor belum menjelaskan hubungan antar kota di JMA dengan perkembangan fasilitas hotel dan restoran. Peneliti menjelaskan hubungan ini melalui tren dan karakteristik pengunjung Kota Bogor.

Tabel 2. Jumlah Restoran dan Hotel di Kota Bogor Berdasarkan Wilayah Tahun 2020

Klasifikasi Jalan	Jumlah Restoran	Persentase (%)	Jumlah Hotel	Persentase (%)
Jalan Pajajaran	202	15,70	16	19,28
Jalan Soleh Iskandar dan Jalan Abdullah Bin Nuh	85	6,60	6	7,23
Jalan dengan akses ke jalan Pajajaran	357	27,74	32	38,55
Kawasan lain	643	49,96	29	34,94
<b>Total</b>	<b>1.287</b>	<b>100</b>	<b>83</b>	<b>100</b>

Sumber: Diolah dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor (2020); Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor (2020)

Data kunjungan ke objek wisata menunjukkan bahwa objek wisata lainnya menjadi destinasi wisata utama. KRB, pusat-pusat penelitian, dan Institut Pertanian Bogor sebagai penciri kota perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Belanda belum sepenuhnya menjadi destinasi wisata edukasi. Kunjungan ke pusat penelitian dan Institut Pertanian Bogor belum menjadi bagian dari paket wisata. Pengunjung KRB sebagian besar adalah pengunjung keluarga yang tujuannya untuk wisata dibandingkan untuk melakukan penelitian. Wisata edukasi ke museum masih banyak dilakukan oleh pelajar. Pengunjung museum yang bukan pelajar lebih signifikan di museum yang berada di KRB. Persentase kunjungan ke KRB terhadap total kunjungan menurun drastis dari 27,23% pada tahun 2016 menjadi 17,31% pada tahun 2018. Penurunan juga terjadi pada kunjungan ke Istana Bogor (12,57% menjadi 1,11%), Jungle Fest (6,11% menjadi 0,43%), Country Club Cimanggu (9,11% menjadi 1,94%), Museum Zoologi (6,89% menjadi 4,39%), peningkatan terjadi pada Tour Object Name (6,11% menjadi 9,82%) dan objek wisata lainnya (31,41% menjadi 61,31%) (BPS Kota Bogor, 2020).

Keterbatasan data kunjungan wisatawan menyebabkan peneliti melakukan survei digital terhadap 747 pengunjung dari luar Kota Bogor. Hasil survei menunjukkan persentase terbesar responden yang datang ke Kota Bogor adalah untuk liburan akhir pekan (21,69%), kepentingan bisnis/pekerjaan (20,35%), mengunjungi keluarga (17,67%), dan kuliner (14,99%). Karakteristik responden mendukung tujuan berkunjung. Sebagian besar responden berada pada kelompok usia produktif 17-45 tahun (87,15%), dengan pendidikan S1/D4 (47,93%), S2/S3 (26,77%), dan aktivitas utama adalah bekerja (74,70%). Karakteristik responden tersebut merupakan kelompok potensial pelaku kunjungan bisnis/pekerjaan. Lamanya kunjungan mendukung tujuan kunjungan. Pengunjung terbanyak adalah pengunjung harian (44,58%), pengunjung kurang dari empat hari (30,66%), dan pengunjung yang datang lebih dari empat hari hanya 24,77%. Kunjungan kurang dari empat hari sesuai dengan lamanya kunjungan harian, bisnis, kunjungan keluarga, dan kuliner.

Hasil survei digital pengunjung menunjukkan bahwa Kota Bogor lebih berkembang sebagai tujuan bisnis/pekerjaan dan kuliner. Tujuan kunjungan bisnis/kerja dan kuliner dapat menjelaskan sebagian dari jumlah kunjungan wisatawan lainnya dari data Kota Bogor dalam Angka. Kunjungan akhir pekan dan kunjungan keluarga dapat berjalan seiring dengan tujuan kuliner (Andersson *et al.*, 2017). Hal ini mengikuti perkembangan hotel dan restoran sebagai fasilitas pariwisata yang paling berkembang di Kota Bogor.

Tabel 3. Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin, Usia, Pendidikan, Pendapatan, Kegiatan Utama, Tujuan Berkunjung, dan Lama Berkunjung

Sosio Demografi	Jumlah	Persentase
<b>Jenis Kelamin</b>		
Perempuan	386	51,67%
Laki-laki	361	48,33%
<b>Usia</b>		
Di bawah 17 tahun	2	0,27%
17 - 25 tahun	149	19,95%
26 - 35 tahun	209	27,98%
36 - 45 tahun	293	39,22%
46 - 55 tahun	85	11,38%
56 - 65 tahun	6	0,80%
Di atas 65 tahun	3	0,40%
<b>Pendidikan</b>		
SMP/MTs/Sederajat	2	0,27%
SMA/MA/Sederajat	131	17,54%
DI/DII/DIII	56	7,50%
DIV/S1	358	47,93%
S2/S3	200	26,77%
<b>Pendapatan/Bulan (Rp)</b>		
Kurang dari 2,5 juta	77	10,31%
2,6 juta < 5 juta	205	27,44%
5 juta < 7,5 juta	149	19,95%
7,5 juta < 10 juta	86	11,51%
10 juta < 12,5 juta	44	5,89%
Lebih dari 12,5 juta	186	24,90%
<b>Kegiatan Utama</b>		
Sekolah	58	7,76%
Mengurus rumah tangga	58	7,76%
Bekerja	558	74,70%
Lainnya selain kegiatan pribadi (sebutkan)	73	9,77%
<b>Tujuan Berkunjung</b>		
Khusus untuk wisata kuliner	112	14,99%
Liburan akhir pekan	162	21,69%
Liburan sekolah	15	2,01%
Mengunjungi keluarga	132	17,67%
Mengunjungi teman	44	5,89%
Pertemuan bisnis/pekerjaan	152	20,35%
Transit/Singgah sebelum melanjutkan perjalanan ke kota/daerah lain	24	3,21%
<b>Lama Kunjungan</b>		
Kurang dari 1 hari/tidak menginap	333	44,58%
2-4 hari	229	30,66%
Lebih dari 4 hari	185	24,77%

Sumber: Data Primer (2019)

Sebagian besar responden (59,59%) berasal dari Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara Kota Bogor dan Jadedabek tidak hanya berupa hubungan antara pengembangan karakter penduduk (komuter), pengembangan perumahan, atau pengembangan industri seperti studi urbanisasi JMA sebelumnya. Asal daerah pengunjung responden menunjukkan hubungan antara Kota Bogor dengan Jadedabek dalam bentuk kunjungan wisata antar kota.

## 5. Pembahasan

Perkembangan MICE dan fasilitas kuliner di Kota Bogor berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perkembangan hotel dan restoran tidak terkait dengan perkembangan sektor industri (Patty & Kuncoro, 2016). Penolakan hasil penelitian Patty & Kuncoro (2016) juga terjadi pada kasus Kota Tangerang. Sektor industri Kota Tangerang memberikan kontribusi pendapatan daerah tertinggi, namun sektor hotel dan restoran memberikan kontribusi pendapatan daerah terendah.

Penanda urbanisasi pada penelitian sebelumnya tidak dapat menjelaskan perkembangan fasilitas pariwisata di Kota Bogor. Mengacu pada indikator urbanisasi dari penelitian sebelumnya, Kota Bogor mengalami urbanisasi paling lambat dibandingkan Detabek. Laju pertumbuhan penduduk, kepadatan penduduk, peningkatan industri, perdagangan, permukiman mandiri, dan *real estate* di Kota Bogor paling kecil dibandingkan Detabek (kecuali perkembangan sektor *real estate* di atas Kota Depok). Perkembangan hotel dan restoran di Kota Bogor menunjukkan bahwa perkembangan fasilitas pariwisata mungkin tidak selalu terkait dengan dampak urbanisasi lainnya.

Sejarah urbanisasi Kota Bogor tidak mendukung perkembangan hotel dan restoran. Kota Bogor bukanlah pusat pemerintahan dan pusat perekonomian daerah kota. Pusat pemerintahan kota telah bergeser seluruhnya ke Jakarta, dan perkembangan ekonomi Kota Bogor berada pada sektor perdagangan besar dan eceran. Pemilihan destinasi wisata bagi pengunjung menunjukkan bahwa Kota Bogor bukanlah destinasi wisata untuk pendidikan, sejarah, atau peristirahatan.

Pengembangan hotel dan restoran tidak terkait dengan pengembangan sektor pariwisata lainnya. Banyaknya hotel dan restoran di Jalan Tajur sebagai kawasan yang berbatasan dengan kawasan Puncak menunjukkan bahwa perkembangan *mass tourism* di kawasan Puncak tidak berdampak pada konsentrasi di Jalan Pajajaran. Citra Kota Bogor sebagai kota peristirahatan dari vegetasi pepohonan yang rindang masih dirasakan oleh warga dan pengunjung, seiring dengan citra Kota Bogor sebagai kota bersejarah (Hartanti, 2014). Namun kunjungan wisatawan tidak mengunggulkan museum dan KRB sebagai penanda wisata kota bersejarah dan kota pengembangan ilmu pengetahuan.

Urbanisasi sebagai penggerak arus kegiatan bisnis dan pariwisata antar kota menjelaskan perkembangan fasilitas hotel dan restoran di Kota Bogor. Pembangunan jalan tol Jagorawi sebagai penanda fisik urbanisasi di Kota Bogor menghubungkan Kota Bogor dengan kota Jadedabek. Tol Jagorawi menyebarkan aktivitas industri dan pemukiman serta menyebarkan arus pengunjung antar kota untuk tujuan wisata. Ketergantungan fasilitas hotel pada kegiatan pertemuan antar kota, pemusatan fasilitas hotel dan restoran di kawasan sekitar pintu keluar tol, karakteristik pengunjung, dan daerah asal pengunjung menunjukkan pentingnya posisi pengunjung dan aktivitas pengunjung Jadedabek terhadap perkembangan hotel dan fasilitas restoran di Kota Bogor. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan JMA antar kota selain penelitian sebelumnya.

## 6. Kesimpulan

Kasus Kota Bogor menunjukkan bahwa urbanisasi dapat dipelajari dari perkembangan fasilitas pariwisata. Perkembangan hotel dan restoran bisa jadi tidak terkait dengan perkembangan sektor lain akibat urbanisasi. Urbanisasi Kota Bogor menggambarkan bentuk fasilitas pariwisata yang paling berkembang. Arus pengunjung dan bentuk aktivitas pengunjung antar kota di *Jakarta Metropolitan Area* (JMA) untuk tujuan wisata bisnis dan kuliner menentukan perkembangan fasilitas hotel dan restoran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi JMA tidak hanya menghasilkan arus modal yang mendorong terbentuknya kota mandiri, kota komuter, dan kota industri di kawasan sekitar Jakarta tetapi juga menghasilkan arus aktivitas wisata residen antar kota di JMA dan membangun suatu bentuk pariwisata kota di sekitar Jakarta.

Penelitian ini tidak dapat menjelaskan mengapa hasil urbanisasi di Kota Bogor berbeda dengan kota Detabek. Hal ini merupakan kekurangan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## 7. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

## 8. Pernyataan *Conflicts of Interest*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini.

## Daftar Pustaka

- Abdunnur, A. (2020). Nexus of Fisheries and Agriculture Production and Urbanization on Ecological Footprint: New Evidence from Indonesian Economy. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 10(3), 190–195. <https://doi.org/10.32479/ijeep.9172>
- Adam, A. M. (2020). Sample Size Determination in Survey Research. *Journal of Scientific Research and Reports*, 90–97. <https://doi.org/10.9734/jsrr/2020/v26i530263>
- Andersson, T. D., Mossberg, L., & Therkelsen, A. (2017). Food and tourism synergies: perspectives on consumption, production and destination development. *Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism*, 17(1), 1–8. <https://doi.org/10.1080/15022250.2016.1275290>
- Arifien, Y., & Rustiadi, E. (2019). Change Pattern of Land Use of Jabodetabek Area Through Irio and Dimamic System Approach. *Agricultural Science*, 3(1), 12–21. Retrieved from <http://agriscience.scientific-work.org/index.php/agriscience/article/view/28>
- Badan Pusat Statistik. (2010). Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan di Indonesia.
- Budiman, A., Kamil, M., & Hufad, A. (2019). Art Education Tourism Model: Study on the Implementation of Art Education Tourism Model in Sanggar Saung Udjo-Indonesia. *Proceedings of the International Conference on Arts and Design Education (ICADE 2018)*, 178–182. Bandung, Indonesia: Faculty of Art and Design Education Universitas Pendidikan Indonesia. <https://doi.org/10.2991/icade-18.2019.41>
- Cahya, D. L., Martini, E., & Kasikoen, K. M. (2018). Urbanization and Land Use Changes in Peri-Urban Area using Spatial Analysis Methods (Case Study: Ciawi Urban Areas, Bogor

- Regency). *2nd Geoplanning-International Conference on Geomatics and Planning. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 123 (2018) 012035. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/123/1/012035>
- BPS Provinsi Jawa Barat (2010). Jawa Barat dalam Angka 2010.
- BPS Kota Bekasi. (2020). Kota Bekasi dalam Angka 2020.
- BPS Kota Bogor. (2020). Kota Bogor dalam Angka 2008-2020.
- BPS Kota Depok. (2020). Kota Depok dalam Angka 2020.
- BPS Kota Tangerang. (2020). Kota Tangerang dalam Angka 2020.
- Danasasmita, S. (2003). *Melacak Sejarah Pakuan Pajajaran dan Prabu Siliwangi*. Bandung, Indonesia: PT Kiblat Buku Utama.
- Danasasmita, S. (2012). *Sejarah Bogor*. Bogor, Indonesia: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bogor.
- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. (2020). Data Pariwisata Kota Bogor 2009-2020.
- Firman, T. (2004). Demographic and spatial patterns of Indonesia's recent urbanisation. *Population, Space and Place*, 10(6), 421-434. <https://doi.org/10.1002/psp.339>
- Firman, T. (2008). In search of a governance institution model for Jakarta Metropolitan Area (JMA) under Indonesia's new decentralisation policy: old problems, new challenges. *Public Administration and Development*, 28(4), 280-290. <https://doi.org/10.1002/pad.504>
- Firman, T. (2011). Post-suburban elements in an Asian extended metropolitan region: The case of Jabodetabek (Jakarta Metropolitan Area). Dalam N. A. Phelps dan Fulong Wu (Eds). *International Perspectives on Suburbanization: A Post-Suburban World?* (pp. 195-209). New York: Palgrave Macmillan. [https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230308626\\_11](https://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230308626_11)
- Firman, T. (2014). Inter-local-government partnership for urban management in decentralizing Indonesia: from below or above? Kartamantul (Greater Yogyakarta) and Jabodetabek (Greater Jakarta) compared. *Space and Polity*, 18(3), 215-232. <https://doi.org/10.1080/13562576.2014.959252>
- Firman, T. (2016). Demographic Patterns of Indonesia's Urbanization, 2000-2010: Continuity and Change at the Macro Level. In C. Z. Guilmoto & G. W. Jones (Eds.), *Contemporary Demographic Transformations in China, India and Indonesia (Demographic Transformation and Socio-Economic Development* (pp. 255-269). Cham, Switzerland: Springer. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-24783-0\\_16](https://doi.org/10.1007/978-3-319-24783-0_16)
- Firman, T., & Fahmi, F. Z. (2017). The Privatization of Metropolitan Jakarta's (Jabodetabek) Urban Fringes: The Early Stages of "Post-Suburbanization" in Indonesia. *Journal of the American Planning Association*, 83(1), 68-79. <https://doi.org/10.1080/01944363.2016.1249010>
- Firman, T., Kombaitan, B., & Pradono, P. (2007). The Dynamics of Indonesia's Urbanisation, 1980-2006. *Urban Policy and Research*, 25(4), 433-454. <https://doi.org/10.1080/08111140701540752>
- Goss, A. (2011). *The Floracrats: State-sponsored science and the failure of the enlightenment in Indonesia*. Madison: The University of Wisconsin Press Wisconsin.
- Hannigan, J. (1995). Tourism urbanization. *Current Sociology*, 43(1), 192-200.
- Hartanti, N. B. & Martokusumo, W. (2013, October). Street network planning and changing urban identity in Bogor City Center. Paper presented at 2<sup>nd</sup> Planocosmo Conference, ITB Bandung.
- Hartanti, N. B. (2014). Maintaining the urban identity by managing streetscapes character of Bogor City. Paper presented at International Conference on Urban and Regional

- Planning, 2014. [https://www.researchgate.net/profile/Nurhikmah-Hartanti/publication/317176368\\_Maintaining\\_The\\_Urban\\_Identity\\_By\\_Managing\\_Streetscapes\\_Character\\_Of\\_Bogor\\_City/links/5929a2a2aca27295a808aa68/Maintaining-The-Urban-Identity-By-Managing-Streetscapes-Character-Of-Bogor-City.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Nurhikmah-Hartanti/publication/317176368_Maintaining_The_Urban_Identity_By_Managing_Streetscapes_Character_Of_Bogor_City/links/5929a2a2aca27295a808aa68/Maintaining-The-Urban-Identity-By-Managing-Streetscapes-Character-Of-Bogor-City.pdf)
- Hotimah, O., Wirutomo, P., & Alikodra, H. S. (2015). Conservation of World Heritage Botanical Garden in an Environmentally Friendly City. *Procedia Environmental Sciences*, 28, 453–463. <https://doi.org/10.1016/j.proenv.2015.07.055>
- Hudalah, D., & Firman, T. (2012). Beyond property: Industrial estates and post-suburban transformation in Jakarta Metropolitan Region. *Cities*, 29(1), 40–48. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2011.07.003>
- Iskandar, R. (2018 September). *Selintas Sejarah Kepariwisata Kota Bogor*. Bogor, Indonesia: Mangle.
- Kusuma, C. S. D. (2019). MICE-Masa Depan Bisnis Pariwisata Indonesia. *Efisiensi - Kajian Ilmu Administrasi*, 16(2), 52–62. <https://doi.org/10.21831/efisiensi.v16i2.27420>
- Law, C. M. (1991). Tourism and urban revitalization. *East Midlands Geographer*, 14, 49–60. <https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/19911889356>
- Lefebvre, H. (1991). *The production of space*. (Donald Nicholson-Smith, penerjemah). Cambridge, Massachusetts: Blackwell.
- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Nilai Ambang Batas
- Mullins, P. (1991). Tourism urbanization. *International Journal of Urban and Regional Research*, 15(3), 326–342. <https://sci-hub.do/10.1111/j.1468-2427.1991.tb00642.x>
- Nurwanda, A. & Honjo, T. (2018a). Analysis of land use change and expansion of surface urban heat island in Bogor City by remote sensing. *ISPRS Int. J. Geo-Inf*, 7, 165
- Nurwanda, A. & Honjo, T. (2018b). City expansion and urban heat island in Bogor. *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* 179 012007. <https://www.mdpi.com/2220-9964/7/5/165>
- Nurwanda, A. & Honjo, T. (2020). The prediction of city expansion and land surface temperature in Bogor City, Indonesia. *Sustainable Cities and Society*, 52 (2020) 101772. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S221067071832540X>
- Ormond, M., Wong Kee Mun & Chan Chee Khoo. (2014). Medical tourism in Malaysia: How can we better identify and manage its advantages and disadvantages? *Glob Health Action*, 7, 25201. Retrieved from <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/gha.v7.25201%40zgha20.2015.8.issue-s3>
- Patty, R. & Kuncoro, M. (2016). The linkage between industrialization, urbanization, and tourism: lessons from ASEAN and Indonesia. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(3). 33-44. Retrieved from <http://ijbel.com/wp-content/uploads/2017/01/ECON-99.pdf>
- Pauker, G. J. (1961). Indonesia's Eight-Year Development Plan. *Pacific Affairs*, 34(2), 115. <https://doi.org/10.2307/2752985>
- Pribadi, D. O., & Pauleit, S. (2015). The dynamics of peri-urban agriculture during rapid urbanization of Jabodetabek Metropolitan Area. *Land Use Policy*, 48, 13–24. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.05.009>
- Rani, N. S. A., Suradi, Z., & Omar, C. M. C. (2016). An overview of medical tourism in Malaysia: A review on the five a's of tourist destination selection. *Rev. Integr. Bus. Econ. Res*, 5(2). <https://www.researchgate.net/profile/Nazatul-Shima>

[Rani/publication/305140302\\_An\\_Overview\\_of\\_Medical\\_Tourism\\_in\\_Malaysia\\_A\\_Review\\_on\\_the\\_Five\\_A%27s\\_of\\_Tourist\\_Destination\\_Selection/links/594a2132aca272a30c6cd547/An-Overview-of-Medical-Tourism-in-Malaysia-A-Review-on-the-Five-As-of-Tourist-Destination-Selection.pdf](https://doi.org/10.1016/j.pro.2019.04.001)

- Rosyidie, A. (2012). Scientific Tourism Potential in Bandung City. *ASEAN Journal on Hospitality and Tourism*, 11(2), 129-149. <https://doi.org/10.5614/ajht.2012.11.2.05>
- Robbany, I. F., Gharghi, A., & Traub, K. (2019). Land Use Change Detection and Urban Sprawl Monitoring in Metropolitan Area of Jakarta (Jabodetabek) from 2001 to 2015. *GEODETA 2019. The 1st International Conference on Geodesy, Geomatics, and Land Administration 2019*. Retrieved from <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Engineering/article/view/5862>
- Simanjuntak, M. (2013). Opportunity for Tourism Professional Development in Indonesia. *Binus Business Review*, 4(1), 473-486. <https://doi.org/10.21512/bbr.v4i1.1412>
- Singh, N. (2014). Healthcare tourism: An emerging concept. *IJMRR*, 4(7), 741-745. Retrieved from <https://search.proquest.com/openview/81fad1a546aa155d4a99d28e3d72465f/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2028922>
- Tinker, I. & Walker, M. (1973). Planning for regional development in Indonesia. *Asian Survey*, 1102-1120. <https://www.jstor.org/stable/2642671?seq=1>
- Tjiook, W. (2017). Pecinan as an inspiration The contribution of Chinese Indonesian architecture to an urban environment. *Wacana*, 18(2), 556-580. [https://brill.com/view/journals/waca/18/2/article-p556\\_12.xml](https://brill.com/view/journals/waca/18/2/article-p556_12.xml)
- Tohjiwa, A.D., Soetomo, S., Sjahbana, J.A., & Purwanto, E. (2010). Kota Bogor dalam Tarik Menarik Kekuatan Lokal dan Regional. Dipresentasikan di Seminar Nasional Riset Arsitektur dan Perencanaan (SERAP) 1, UGM Yogyakarta. <http://repository.gunadarma.ac.id/576/>
- Vickers, A. (2005). *A history of modern Indonesia*. Cambridge: University Press.
- Widyasamratri, H., Souma, K. & Suetsugi, T. (2019). Study of urban temperature profile on the various land cover in the Jakarta Metropolitan Area Indonesia. *Indonesian Journal of Geography*, 51(2), 357-363. <https://search.proquest.com/openview/3965e6b9e01f35e1b0262253bf4b5b17/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2032646>
- Wijarnaka (2006). *Sukarno dan desain rencana ibu kota RI di Palangkaraya*. Yogyakarta: Ombak.
- Winarno, F.G. (1990). *Bogor "Hari esok masa lampau"*. Bogor: PT Binahati.
- Winarso, H. & Firman, T. (2002). Residential land development in Jabotabek, Indonesia: triggering economic crisis? *Habitat International*, 26, 487-506. Retrieved from <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0197397502000231>
- Winarso, H., Hudalah, D., & Firman, F. (2015). Peri-urban transformation in the Jakarta metropolitan area. *Habitat Internasional*, 49, 221-229.
- Zakaria, M. M. (2010). *Kota Bogor: Studi tentang perkembangan ekologi kota abad ke-19 hingga ke-20*. Bandung: Sastra Unpad Press.
- Zuhdi, S. (2017). *Bogor Jaman Jepang 1942-1945*. Depok: Komunitas Bambu.

### Tentang Penulis

**Agustina Multi Purnomo** memperoleh gelar Doktor dalam bidang Ilmu Sosiologi dari Universitas, Indonesia, pada tahun 2021. Penulis adalah dosen pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda.

E-Mail: [agustina.m@unida.ac.id](mailto:agustina.m@unida.ac.id)